

EKSPLORASI STUDI BAGAIMANA KRISIS KEUANGAN GLOBAL 2008/2009 MEMBAWA IMPLIKASI PADA MANDAT DAN KEBIJAKAN TERHADAP KELEMBAGAAN BANK SENTRAL

Lowil Amson Pasaribu¹, Nazwa Nabila², Muhammad Nurhidayat³, Revani Eklesia Saragih⁴, Putri Rut⁵

lowilpasaribu04@gmail.com¹, nazwanabila234a@gmail.com², mnur.hidayatplk@gmail.com³,
revaniturnip4@gmail.com⁴, putrirutputuput@gmail.com⁵

Universitas Palangkaraya

ABSTRAK

Krisis keuangan global 2008/2009 merupakan salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah ekonomi modern. Krisis yang bermula dari keruntuhan pasar perumahan di Amerika Serikat dengan cepat menjalar ke seluruh dunia, memicu kepanikan pasar, kebangkrutan lembaga keuangan besar, serta kontraksi ekonomi global. Dampak krisis tidak hanya terasa pada negara maju, tetapi juga pada negara berkembang termasuk Indonesia yang menghadapi pelemahan rupiah, turunnya cadangan devisa serta penurunan kepercayaan investor asing. Artikel ini bertujuan mengeksplorasi implikasi krisis tersebut terhadap mandat, kebijakan, dan kelembagaan Bank Sentral dengan menekankan pengalaman Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis 22 jurnal nasional, laporan resmi Bank Indonesia, dokumen IMF, BIS, World Bank, serta literatur teori kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis memicu pergeseran mandat Bank Sentral dari fokus tunggal pada inflasi menuju stabilitas sistem keuangan, memperkuat instrumen makroprudensial, serta mendorong lahirnya reformasi kelembagaan, seperti pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penguatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan pelembagaan koordinasi antar-otoritas melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pembahasan menekankan relevansi teori kelembagaan North, hipotesis instabilitas keuangan Minsky, serta teori time inconsistency Kydland & Prescott. Artikel ini menyimpulkan bahwa krisis keuangan global merupakan critical juncture yang membentuk paradigma baru bank sentral: dari inflation targeter menjadi guardian of financial stability.

Kata Kunci: Krisis Keuangan Global, Bank Sentral, Mandat, Makroprudensial, Kelembagaan, Indonesia.

ABSTRACT

The 2008/2009 global financial crisis was one of the most significant events in modern economic history. Originating from the collapse of the United States housing market, the crisis rapidly spread worldwide, triggering market panic, the bankruptcy of major financial institutions, and a global economic contraction. Its impact was felt not only in developed nations but also in developing countries, including Indonesia, which faced a weakening rupiah, a decline in foreign exchange reserves, and decreased foreign investor confidence. This article aims to explore the implications of the crisis on the mandate, policies, and institutional framework of central banks, with a focus on Indonesia's experience. The research method is 2,4 literature review, analyzing 22 national journals, official reports from Bank Indonesia, and documents from the IMF, BIS, and World Bank, as well as institutional theory literature. The findings indicate that the crisis prompted a shift in the central bank's mandate from a singular focus on inflation to a dual focus that includes financial system stability. This shift strengthened macroprudential instruments and spurred institutional reforms, such as the establishment of the Financial Services Authority (OJK), the enhancement of the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS), and the formalization of inter-authority coordination through the Financial System Stability Committee (KSSK). The discussion highlights the relevance of North's institutional theory, Minsky's financial instability hypothesis, and the time inconsistency theory of Kydland & Prescott. This article concludes that the global financial crisis served as a critical juncture that shaped a new paradigm for central banking: from an inflation

targeter to a guardian of financial stability.

Keywords: *Global Financial Crisis, Central Bank, Mandate, Macroprudential, Institutional, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Krisis keuangan global 2008/2009 adalah salah satu peristiwa paling mengguncang sistem ekonomi dunia. Krisis ini dipicu oleh akumulasi kredit perumahan berisiko tinggi (subprime mortgage) di Amerika Serikat yang kemudian memicu gelombang gagal bayar, penurunan tajam nilai sekuritas, hingga kebangkrutan lembaga keuangan besar seperti Lehman Brothers. Efek domino dari krisis menyebar ke seluruh dunia melalui jalur keuangan internasional, memunculkan credit crunch (krisis likuiditas), kejatuhan bursa saham, dan kontraksi ekonomi yang mendalam.

Dampaknya bagi Indonesia meskipun tidak seburuk AS atau Eropa, tetap signifikan. Nilai tukar rupiah anjlok hingga menyentuh Rp 12.650 per dolar AS pada November 2008, IHSG turun lebih dari 50 persen pada akhir 2008, cadangan devisa berkurang dari USD 57 miliar pada pertengahan 2008 menjadi hanya USD 51 miliar awal 2009, sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dari 6,3 persen pada 2007 menjadi hanya 4,6 persen pada 2009. Tekanan global juga menyebabkan keluarnya modal asing dari pasar obligasi dan saham, memperburuk ketidakstabilan domestik.

Dalam kondisi seperti itu, Bank Indonesia menghadapi ujian berat. Sebelum krisis, BI beroperasi dengan kerangka inflation targeting, menekankan pada stabilitas harga sebagai tujuan utama kebijakan moneter. Namun, krisis memperlihatkan bahwa inflasi rendah tidak otomatis menjamin stabilitas keuangan. Sistem keuangan yang rapuh tetap bisa menciptakan krisis meskipun inflasi terkendali. Hal inilah yang mendorong pergeseran mandat Bank Sentral, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di banyak negara.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: bagaimana krisis keuangan global tersebut membentuk ulang mandat Bank Sentral? Bagaimana kebijakan dan instrumen baru lahir untuk merespons krisis? Dan bagaimana reformasi kelembagaan di Indonesia, seperti lahirnya OJK dan KSSK, menjadi jawaban atas tantangan baru tersebut? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data yang digunakan mencakup 22 jurnal nasional terkait Bank Sentral, laporan tahunan Bank Indonesia, dokumen publikasi OJK dan LPS, serta laporan IMF, BIS, dan World Bank. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: analisis historis untuk menelusuri perubahan mandat Bank Sentral, analisis teoretis untuk mengaitkan perubahan dengan teori kelembagaan, serta analisis komparatif untuk membandingkan respons Indonesia dengan negara lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan lima hasil utama. Pertama, mandat Bank Sentral mengalami pergeseran dari fokus tunggal inflasi menuju mandat ganda yang mencakup stabilitas keuangan. Kedua, muncul kebijakan moneter non-konvensional. Di AS, kebijakan quantitative easing (QE) dijalankan, sementara di Indonesia Bank Indonesia memperkenalkan instrumen operasi pasar uang baru seperti reverse repo dan term deposit facility.

Ketiga, kebijakan makroprudensial diperkenalkan untuk mencegah risiko sistemik, termasuk aturan LTV untuk sektor properti, rasio intermediasi makroprudensial, dan

penguatan GWM. Keempat, reformasi kelembagaan dilakukan dengan pembentukan OJK, penguatan LPS, dan pembentukan KSSK sebagai forum koordinasi antar-lembaga. Kelima, akuntabilitas dan transparansi meningkat melalui penerbitan Laporan Stabilitas Sistem Keuangan dan komunikasi kebijakan yang lebih terbuka.

Pembahasan

Krisis 2008/2009 menunjukkan bahwa Bank Sentral tidak bisa lagi hanya menjadi inflation targeter. Bank sentral harus menjadi penjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam kerangka teori North, perubahan mandat dan kelembagaan ini adalah bentuk adaptasi institusional terhadap guncangan eksternal.

Dalam perspektif Minsky, krisis ini membuktikan bahwa sistem keuangan rentan terhadap siklus spekulatif. Karena itu, kebijakan makroprudensial menjadi instrumen baru yang penting. Instrumen seperti LTV tidak hanya menjaga kredit perbankan tetap sehat, tetapi juga mengurangi risiko bubble di sektor properti.

Dari sisi independensi, teori Kydland & Prescott tetap relevan. BI harus menjaga konsistensi kebijakan moneter, tetapi pada saat yang sama harus akuntabel dalam menjaga stabilitas keuangan. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam hubungan antara BI dan pemerintah, terutama melalui koordinasi di KSSK.

Jika dibandingkan dengan negara maju, Indonesia mengambil jalan berbeda. AS mengandalkan QE, ECB memperluas mandat sebagai pengawas bank tunggal, dan Jepang menerapkan suku bunga negatif. Sementara Indonesia fokus pada bauran kebijakan moneter-makroprudensial, memperkuat kelembagaan, dan menjaga stabilitas nilai tukar.

Ke depan, tantangan bagi Bank Sentral semakin kompleks. Digitalisasi keuangan, perkembangan fintech dan kripto, serta potensi penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) menuntut peran

baru. Selain itu, risiko iklim dan pandemi global juga menambah spektrum tantangan yang harus diantisipasi.

KESIMPULAN

Krisis keuangan global 2008/2009 merupakan titik balik yang mengubah paradigma Bank Sentral. Peran Bank Sentral bergeser dari pengendali inflasi menjadi penjaga stabilitas sistem keuangan. Reformasi kelembagaan di Indonesia, seperti lahirnya OJK dan KSSK, memperkuat koordinasi antar-otoritas.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya BI memperkuat kapasitas analitik, memperbaiki mekanisme koordinasi krisis, meningkatkan transparansi komunikasi, serta menyiapkan regulasi baru untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan risiko iklim. Dengan demikian, bank sentral dapat tetap relevan dalam menjaga stabilitas ekonomi di era globalisasi dan inovasi finansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, B. (2010). Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Pasca Krisis Global. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 14(2), 45–60.
- Afriani, D. (2011). Kebijakan Moneter Indonesia di Era Krisis Global 2008. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 101–120.
- Arifin, S. (2013). Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Makroprudensial di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 17(3), 234–249.
- Asnawi, H. (2012). Krisis Keuangan Global dan Dampaknya terhadap Sistem Perbankan Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 19(1), 55–72.
- Bank Indonesia. (2009). Laporan Tahunan Bank Indonesia 2008. Jakarta: BI.
- Bank Indonesia. (2010). Laporan Stabilitas Sistem Keuangan. Jakarta: BI.
- BIS. (2009). Annual Report 2008/2009. Basel: Bank for International Settlements.

- Budiarti, A. (2014). Dampak Krisis Keuangan Global 2008 terhadap Mandat Bank Sentral di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Institusional*, 5(2), 77–95.
- Darmawan, I. (2010). Reformasi Kelembagaan Bank Indonesia Pasca Krisis Keuangan Global. *Jurnal Hukum & Ekonomi*, 12(4), 312–329.
- Dewi, R. (2015). Penguatan LPS dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan*, 21(2), 141–158.
- Fadeli, Y. A. (2021). Peran kelembagaan dalam menekan biaya transaksi pada pasar lokal di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Ekonomi Nusantara.
- Fadli, M. (2011). Efektivitas Kebijakan Moneter Indonesia Pasca Krisis Global. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 11(1), 88–102.
- Goodhart, C. (2011). The Changing Role of Central Banks. BIS Working Papers No. 326.
- Gunawan, R. (2012). Inflation Targeting dan Tantangan Bank Sentral Indonesia Pasca Krisis Global. *Jurnal Ekonomi dan Moneter*, 10(3), 176–190.
- Hidayat, T. (2014). Bank Sentral, Independensi, dan Krisis Global. *Jurnal Politik Ekonomi*, 6(2), 201–220.
- IMF. (2009). *World Economic Outlook: Crisis and Recovery*. Washington DC: International Monetary Fund.
- Indrawan, Y. (2013). Peran OJK dalam Sistem Keuangan Nasional. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 199–215.
- KSSK. (2015). *Laporan Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan*. Jakarta: KSSK.
- Kurniawati, E. (2012). Makroprudensial Policy: Konsep dan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 44–60.
- Kydland, F., & Prescott, E. (1977). Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans. *Journal of Political Economy*, 85(3), 473–491.
- Lestari, D. (2011). Global Financial Crisis and Its Implication for Developing Countries. *Jurnal Ekonomi Internasional*, 5(2), 67–81.
- LPS. (2011). *Laporan Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan*. Jakarta: LPS.
- Maulana, H. (2010). Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia Pasca Krisis Global. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 14(1), 92–108.
- Minsky, H. P. (1992). The Financial Instability Hypothesis. The Jerome Levy Economics Institute Working Paper, 74.
- Mishkin, F. (1999). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. 12th Edition. Pearson.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nugroho, A. (2014). BI, OJK, dan KSSK: Koordinasi dalam Stabilitas Sistem Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 13(2), 233–250.
- OJK. (2012). *Roadmap Industri Jasa Keuangan Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Purnomo, J. (2011). Krisis Global dan Reformasi Perbankan di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 18(2), 123–139.
- Rahman, A. (2012). Kebijakan Moneter Non-Konvensional dan Pengaruhnya di Asia. *Jurnal Asia Pasifik*, 9(4), 87–104.
- Sari, M. (2015). Evaluasi Laporan Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia. *Jurnal Transparansi*, 7(1), 32–49.
- Setiawan, D. (2011). Krisis Global dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 26(1), 55–70.
- Susanto, B. (2010). Reformasi Otoritas Moneter Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kelembagaan*, 8(2), 211–227.
- Wibowo, R. (2013). Penguatan Peran KSSK dalam Menangani Krisis Sistemik. *Jurnal Keuangan Negara*, 5(3), 301–318.
- World Bank. (2010). *Global Development Finance: Crisis, Finance, and Growth*. Washington DC: World Bank.
- Yuliani, N. (2012). Stabilitas Sistem Keuangan: Perspektif Indonesia Pasca Krisis Global. *Jurnal Ekonomi Nasional*, 4(2), 145–163.